

**DEKLARASI GURU JAKARTA
TOLAK POLITISASI GURU UNTUK PILKADA BERSIH, DAMAI
DAN BERINTEGRITAS**

Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua tanggal 20 September tinggal menghitung hari. Seperti layaknya event serupa di banyak daerah di Indonesia sejak era otonomi daerah selalu terjadi politisasi terhadap guru. Para pendidik tersebut sangat rawan dipolitisasi saat pemilihan umum kepala daerah (pilkada), juga rentan untuk dilibatkan dalam dukung-mendukung calon pemimpin daerah yang terlibat pilkada. Padahal para guru, baik PNS maupun bukan PNS seharusnya bersikap netral, tidak boleh memihak.

Dalam sebuah negara demokrasi, seharusnya setiap penyelenggaraan pemilu (dan Pilkada) para guru dan tenaga administrasi (tenaga kependidikan) tidak perlu ragu menentukan pilihan politiknya sesuai hati nurani. Tidak boleh dipaksa memilih salah satu calon dan tidak boleh diintimidasi apalagi di beri sanksi karena pilihan politiknya. Kebebasan menentukan pilihan tersebut dilindungi oleh UU No. 39/1999, Pasal 23 yang menyatakan: ayat (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; ayat (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Namun, kenyataannya dalam Pilkada DKI Jakarta,-- terutama putaran kedua— berdasarkan laporan yang diterima FMGJ (Forum Musyawarah Guru Jakarta) diduga terjadi politisasi guru oleh birokrasi pendidikan. Bentuk-bentuk politisasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

**Laporan Pengaduan PILKADA DKI Jakarta
(Bidang Pendidikan)**

No	Modus	Aktor
1	Baliho dibuat sekolah berisi ucapan terimakasih pada Gubernur atas sekolah gratis atau program wajar 12 tahun dengan biaya pembuatan spanduk dari kas sekolah.	Kepala Sekolah menjalankan perintah Kepala Dinas Pendidikan
2	SMK 57 Pasar Minggu, untuk memberikan transport untuk guru yang rumahnya di luar DKI Jakarta, tetapi memiliki hak untuk memilih DKI Jakarta. Uangnya dari kantong kepala sekolah, besarnya uang berkisar Rp 50.000 – Rp 100.000	Wakil Kepala Sekolah mendapat perintah dari kepala sekolah untuk mencari guru yang dimaksud dan ikut membagikan uangnya
3	Sabtu malam, 8 September 2012 ada sms beredar ada kegiatan MGMP PKN di SMP 85 jam 8 wib. Di sana pembukaan kegiatan dihadiri oleh guru PKN SMP se-Jakarta Selatan. Pembukaan oleh Ketua MGMP dan Pengarahan dari sekretaris MKS Drs. H. Tadjudin MA MPD, pokok pengarahan untuk memilih foke karena sudah berjasa atas kepentingan komunitas guru. Kemudian guru diminta mengerjakan tugas tertulis yang akan diarahkan ketua mgmp pkn Jakarta selatan, dimana tugas anak-anak (terstruktur berupa kuisisioner ttg keberhasilan-keberhasilan foke) mengarah pada orangtua harus memilih foke .	Ketua MGMP Pkn SMP wilayah Jakarta Selatan dan sekretaris MKS Jakarta Selatan
4	Sholat Iedul Fitri di Dinas Pendidikan DKI Jakarta (padahal hari libur nasional) tapi setiap sekolah wajib mengirim perwakilan sekolah minimal 10 guru, dimana	Penceramah sholat iedul fitri

	khotbah diarahkan untuk memilih kandidat no 1 sebagai gubernur DKI Jakarta dan mengarahkan jamaah untuk dalam PILKADA DKI Jakarta memilih pemimpin yang seiman	
5	Beberapa sekolah kedatangan tim khusus yang akan mensosialisasikan “Anak Jakarta jangan Golput”, namun diakhir pengarahannya (bukan diskusi atau dialog) para siswa dibagikan brosur yang mengarahkan untuk memilih “kumis” dan brosur ini juga brisi “terimakasih gubernurku”.	Tidak jelas, yang pasti sekelompok anak muda yang berusia 20-23 tahun dan atas izin pihak sekolah
6	Adanya penyebaran buku “ngintip yuk 5 tahun ini Bang Fauzi Bowo dah ngapai aja sih” ke berbagai sekolah.	Tidak jelas, yang pasti mengarah pada promosi kandidat no.1
7	Para guru SMP dan SMA yang beralamat di DKI Jakarta di berbagai sekolah negeri terpilih mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan (selama 5 hari) dan pelatihan diarahkan untuk mengamankan kandidat no 1; diakhir pelatihan para peserta diminta mengisi form “gaya ORBA” untuk mengamankan kandidat 1 tetapi ditolak oleh para peserta	Pelaksana kegiatan Kesbangpol DKI Jakarta
8	Para guru PKn SMP dan SMA diundang untuk mengikuti pelatihan 3 hari dengan tema HAM. Namun, para penyaji yang berasal dari Dinas Pendidikan justru menyampaikan HAM untuk mengamankan kandidat no. 1 meskipun dengan cara yang halus	Kanwil Kemenhukham DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta
9	Maraknya kegiatan halal bi halal di kalangan guru yang dihadiri para pejabat dari birokrasi pendidikan, terjadi mulai dari tingkat wilayah kota sampai tingkat propinsi. Namun, dalam sambutannya para pejabat selalu menyelipkan pesan-pesan mengamankan kandidat no. 1	Sudin 5 wilayah kota, mulai dari SD, SMP, sampai SMA/SMK dan Disdik DKI Jakarta
10	Di masjid-masjid sekolah, pada saat sholat jumat para khatib bicara tema “memilih pemimpin yang seiman”	Khatib dengan difasilitasi pengurus masjid sekolah

Berdasarkan laporan-laporan tersebut, maka kami para guru sebagai pemilih juga memilih mengambil sikap politik strategis untuk bersama menolak politisasi guru agar tercipta Pilkada DKI Jakarta yang bersih, damai dan berintegritas. Sehingga momentum strategis Pilkada ini dapat terpilih pemimpin yang benar-benar akan mengabdikan pada rakyat dan untuk pendidikan yang berkualitas serta berkeadilan.

Oleh karena itu kami para guru menyatakan komitmen Deklarasi sebagai berikut:

1. Menolak politisasi guru oleh birokrasi pendidikan.
2. Menolak segala bentuk intimidasi dan ancaman terhadap guru yang memiliki pilihan berbeda dengan birokrasi pendidikan.
3. Beri kebebasan guru dan peserta didik untuk memilih sesuai pikiran dan hati nurani.

Jakarta, 18 September 2012

Koalisi Pendidikan : FMGJ, SGT, ICW, FSGI, STB, LBH JAKARTA

**Aliansi Warga Untuk Pilkada Bersih
Jakarta, 19 September 2012**

Darurat PILGUB DKI: Politik Uang dan Politisasi Birokrasi Ancam Demokrasi

Kondisi Terkini

Masa kampanye Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua sudah berakhir. Dalam masa kampanye yang pendek hanya tiga hari tidak mempengaruhi banyaknya politik uang yang terjadi. Setidaknya kami warga Jakarta dan guru yang tergabung dalam Forum Musyawarah Guru DKI menemukan sekitar 10 temuan politik uang di kampung dan 10 temuan politisasi birokrasi guru sekolah.

Selama masa kampanye Pemilukada DKI putaran kedua saat ini dari 20 temuan politik uang dan politisasi birokrasi, setidaknya terjadi beberapa modus politik uang dan pelanggaran kampanye yang masif. Yaitu 1) Pembagian uang secara langsung, 2) Bakti Sosial dan Pengobatan Gratis 3) Pemberian Sembako Gratis dan Murah 4) Pemberian Jamkesda 5) Pelanggaran Kampanye di Sekolah (Sarana Pendidikan). 6) Politisasi Guru di Sekolah.

Praktek politik uang banyak dilakukan oleh pasangan Cagub dan Cawagub Nomor urut satu (1) Fauzi-Bowo sejumlah 10 pelanggaran dan 10 temuan politisasi birokrasi guru.

Lemahnya pengawasan.

Maraknya politik uang di DKI Jakarta disebabkan karena lemahnya pengawasan oleh Panitia Pengawas (Panwas) DKI Jakarta. Ironisnya hingga saat ini PANWAS hanya sedikit menemukan praktek politik uang dan politisasi birokrasi ini. Padahal, mendekati masa pencoblosan, gerakan politik uang dan politisasi birokrasi semakin masif dan terstruktur. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan dimana fungsi pengawasan PANWAS cenderung tidak bertaji, bahkan seperti macan ompong.

Penegakkan Hukum

Maraknya politik uang di DKI Jakarta tentunya akan mengancam demokratisasi dan integritas pemilukada. Hal ini harus ditindak tegas oleh PANWAS agar pelanggaran praktek politik uang yang terjadi bisa ditangani dan diberi sanksi yang berat. Yaitu seperti diatur dalam pasal 117 ayat 2 UU 32/2004 disebutkan "Setiap orang yg dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah". Praktek politik uang tersebut juga bisa diancam pidana penjara 2 – 12 bulan - denda 1jt – 10 jt.

Kesimpulan

1. Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua masih marak dengan praktek-praktek politik uang. Pelanggaran tersebut banyak dilakukan oleh pasangan Fauzi Bowo- Nachrowi.
2. Modus-modus praktek politik uang dan politisasi beragam, mulai 1) Pembagian uang secara langsung, 2) Bakti Sosial dan Pengobatan Gratis 3) Pemberian Sembako Gratis dan Murah 4) Pemberian Jamkesda 5) Pelanggaran Kampanye di Sekolah (Sarana Pendidikan).
3. Khusus untuk incumbent juga terjadi politisasi birokrasi di bidang pendidikan yaitu politisasi guru oleh dinas pendidikan.
4. Politik uang yang marak terjadi di Pemilukada DKI Jakarta karena lemahnya peran PANWAS dalam proses pengawasan pemilukada DKI Jakarta.
5. Disinyalir, politik uang akan marak hingga proses perhitungan suara, dimana penyelenggara seperti PPS, PPK dan KPU juga rawan menjadi objek politik uang.

Rekomendasi

1. PANWAS harus tegas dan berani dalam memproses dan memberi sanksi pelaku segala jenis politik uang.
2. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang melakukan politik uang harus diberi sanksi yang berat dan mengikat.
3. Hingga proses perhitungan suara, kami warga dan guru akan terus memantau dan mengawasi segala jenis korupsi pemilukada seperti politik uang yang terjadi.

Tindaklanjut

Saat ini guru-guru dan warga yang menemukan dugaan politik uang dan politisasi birokrasi mengalami intimidasi oleh birokrasi pemerintah DKI Jakarta dan tim sukses salah satu pasangan calon yang melakukan kecurangan di Pilkada DKI oleh karena itu kami juga akan melapor intimidasi ini ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sore ini Pukul 16.00 WIB.

Lampiran

Laporan Pengaduan PILKADA DKI Jakarta (Politisasi Birokrasi)

No	Modus	Aktor
1	Baliho dibuat sekolah berisi ucapan terimakasih pada Gubernur atas sekolah gratis atau program wajar 12 tahun dengan biaya pembuatan spanduk dari kas sekolah.	Kepala Sekolah menjalankan perintah Kepala Dinas Pendidikan
2	SMK 57 Pasar Minggu, untuk memberikan transport untuk guru yang rumahnya di luar DKI Jakarta, tetapi memiliki hak untuk memilih DKI Jakarta. Uangnya dari kantong kepala sekolah, besarnya uang berkisar Rp 50.000 – Rp 100.000	Wakil Kepala Sekolah mendapat perintah dari kepala sekolah untuk mencari guru yang dimaksud dan ikut membagikan uangnya
3	Sabtu malam, 8 September 2012 ada sms beredar ada kegiatan MGMP PKN di SMP 85 jam 8 wib. Di sana pembukaan kegiatan dihadiri oleh guru PKN SMP se-Jakarta Selatan. Pembukaan oleh Ketua MGMP dan Pengarahan dari sekretaris MKS Drs. H. Tadjudin MA MPD, pokok pengarahan untuk memilih foke karena sudah berjasa atas kepentingan komunitas guru. Kemudian guru diminta mengerjakan tugas tertulis yang akan diarahkan ketua mgmp pkn Jakarta selatan, dimana tugas anak-anak (terstruktur berupa kuisisioner ttg keberhasilan-keberhasilan foke) mengarah pada orangtua harus memilih foke.	Ketua MGMP Pkn SMP wilayah Jakarta Selatan dan sekretaris MKS Jakarta Selatan
4	Sholat Iedul Fitri di Dinas Pendidikan DKI Jakarta (padahal hari libur nasional) tapi setiap sekolah wajib mengirim perwakilan sekolah minimal 10 guru, dimana khotbah diarahkan untuk memilih kandidat no 1 sebagai gubernur DKI Jakarta dan mengarahkan jamaah untuk dalam Pilkada DKI Jakarta memilih pemimpin yang seiman	Penceramah sholat iedul fitri
5	Beberapa sekolah kedatangan tim khusus yang akan mensosialisasikan "Anak Jakarta jangan Golput", namun diakhir pengarahan (bukan diskusi atau dialog) para siswa dibagikan brosur yang mengarahkan untuk memilih "kumis" dan brosur ini juga brisi "terimakasih gubernurku".	Tidak jelas, yang pasti sekelompok anak muda yang berusia 20-23 tahun dan atas ijin pihak sekolah
6	Adanya penyebaran buku "ngintip yuk 5 tahun ini Bang Fauzi Bowo dah ngapai aja sih" ke berbagai sekolah.	Tidak jelas, yang pasti mengarah pada promosi kandidat no.1
7	Para guru SMP dan SMA yang beralamat di DKI Jakarta di berbagai sekolah negeri terpilih mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan (selama 5 hari) dan pelatihan diarahkan untuk mengamankan kandidat no 1; diakhir pelatihan para peserta diminta mengisi form "gaya ORBA" untuk mengamankan kandidat 1 tetapi di tolak oleh para peserta	Pelaksana kegiatan Kesbangpol DKI Jakarta
8	Para guru PKN SMP dan SMA diundang untuk mengikuti pelatihan 3 hari dengan tema HAM. Namun, para penyaji yang berasal dari Dinas Pendidikan justru menyampaikan HAM untuk mengamankan kandidat no. 1 meskipun dengan cara yang halus	Kanwil Kemenhukham DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta
9	Maraknya kegiatan halal bi halal di kalangan guru yang dihadiri para pejabat dari birokrasi pendidikan, terjadi mulai dari tingkat wilayah kota sampai tingkat propinsi. Namun, dalam sambutannya para pejabat selalu menyelipkan pesan-pesan mengamankan kandidat no. 1	Sudin 5 wilayah kota, mulai dari SD, SMP, sampai SMA/SMK dan Disdik DKI Jakarta
10	Di masjid-masjid sekolah, pada saat sholat jumat para khatib bicara tema "memilih pemimpin yang seiman"	Khatib dengan difasilitasi pengurus masjid sekolah

**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN WARGA ATAS PELAKSANAAN PEMILUKADA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012
PUTARAN KEDUA**

NO.	PASANGAN CALON	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	LOKASI DAN PELAKU	SUMBER INFORMASI	KETERANGAN
1	Foke dan Nara (Paslon No.1)	Bakti Sosial Foging. Foging rumah warga gratis ini bertujuan agar warga terbujuk memilih Paslon No.1	RW. 017. Kelurahan Duren Sawit. Tim Sukses	Faturohman Jl. Kelurahan V RT 021/02 Duren Sawit.	Sabtu 15 September 2012
2	Foke dan Nara (Paslon No. 1)	Pembagian Honor kepada ketua RT. Para ketua RT dikumpulkan di aula kelurahan dan diberi pengarahan untuk penguatan kelembagaan agar tetap memilih pemerintahan yang sudah jelas (incumbent)	RW. 017. Kelurahan Duren Sawit. Kepala Desa	Faturohman Jl. Kelurahan V RT 021/02 Duren Sawit.	Jumat, 7 September 2012
3	Foke dan Nara (Paslon No. 1)	Pemberian uang 100.000. Setelah acara sosialisasi penguatan kelembagaan RT/RW warga sebelum pulang diberi amplop berisi uang Rp. 100.000	RW. 017. Kelurahan Duren Sawit. Ketua RT dan RW	Faturohman Jl. Kelurahan V RT 021/02 Duren Sawit	Jumat, 7 September 2012
4	Foke dan Nara (Paslon No. 1)	Sembako Murah. Warga diberikan kupon untuk mendapatkan sembako murah di ranting PKS. Kupon tersebut dibagikan oleh ketua RT dengan gambar Fauzi Bowo dan PKS dengan pesan untuk memilih Paslon No.1	Tim Sukses Foke dan PKS Kampung Melayu Kecil Rt 8/11 (Tempat Bersalin Bidan Putri Saidar)	Abdul Rasyid Kampung Melayu Kecil IRT 12/10 Bukit Duri Jaksel	Minggu, 16 September 2012 Ada bukti
5	Foke dan Nara (Paslon No. 1)	Politik Uang. Dilapangan tembok bolong kampanye tertutup yang bisa masuk hanya yang unya undangan. Peserta dibagikan amplop sebesar 50 ribu.	Jl. Muara Baru Tembok Bolong RT 001/017 Jakarta Utara	N Dela	Tanggal 15 September Jam 12. Ada Bukti
6	Foke dan Nara (Paslon No. 1)	Baksos dan Sembako murah di 2000 titik pada tanggal 16-17 September 2012 dari partai PKS untuk mendukung paslon No.1 dengan bukti Pin Kumis.	Pelaku adalah timses paslon No. 1 dan PKS. Lokasi Posyandu Jl. Joglo Raya RT 01/01 No.548	Dhea Warga Joglo	Tanggal 16-17 September 2012
7	Foke dan Nara (Paslon No. 1)	Pembagian Sembako Gratis oleh Paslon No.1.	Pelaku Timses Paslon No. 1. Tempat, kelapa dua wetankampung baru.	Karyo Ciracas	Tanggal 15 september 2012
8	Foke dan Nara (Paslon No. 1)	Menjanjikan Renovasi tempat PKK jika memilih Paslon No.1 dan menang.	Pelaku Timses Paslon No. 1. Tempat, kelapa dua wetankampung baru.	Karyo Ciracas	Tanggal 12 September 2012
9	Foke dan Nara (Paslon No. 1)	Warga diberi formulir JAMKESDA melalui RT untuk diisi oleh warga dan dikumpulkan ke ketua RT.	Tim PKS pendukung Foke	Jl. Kampung melayu kecil I RT 12/10 Bukit Duri Tebet.	Tanggal 16 September 2012
10	Foke dan Nara (Paslon No. 1)	Pembagian Honor Jumentik sekaligus dikumpulkan dan diarahkan agar tetap memilih incumbent.	Tstaf Kelurahan Duren Sawit	Kelurahan Duren Sawit	Tanggal 8 September 2012